

BAB II

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI RUSIA DI ERA FEDERASI

Dalam bab kedua ini, penulis menjelaskan dinamika politik luar negeri Rusia di era Federasi Rusia. Perlu diketahui bahwa dalam pemerintahannya, Rusia mengalami tiga fase pemerintahan, yaitu fase Tsar atau Kerajaan, kemudian fase berjayanya Komunisme yang ditandai dengan berdirinya Uni Soviet, dan kemudian fase runtuhnya Komunisme yang ditandai dengan berdirinya demokrasi di Rusia. Selanjutnya dijabarkan era pemerintah Federasi Rusia, yaitu Boris Yeltsin, Vladimir Putin, dan secara singkat di era Demitry Medvedev.

A. Era Pemerintahan Boris Yeltsin (1991 – 1999)

Foto 2.1: Boris Yeltsin (sumber: gambar google)



Terpilihnya Boris Nikolayevich Yeltsin atau yang biasa dipanggil Yeltsin sebagai presiden Rusia secara langsung di *Russian Soviet Federated Socialist*

Republic (RSFSR) pada tanggal 12 Juli 1991¹ menjadi salah satu penanda atau sekat antara runtuhnya komunisme Uni Soviet dan awal berdirinya Negara Federasi Rusia, karena pada akhirnya tanggal 25 Desember 1991², Uni Soviet secara resmi telah dibubarkan. Bubarnya Uni Soviet disebabkan oleh adanya pemisahan diri oleh negara – negara yang merasa tidak puas dengan sistem komunisme yang digunakan Uni Soviet. Sistem komunisme dianggap tidak pas bagi mereka yang memisahkan diri, karena tidak memerhatikan hak – hak asasi dan telah berjalan dengan sangat kaku. Setelah Uni Soviet berubah menjadi Negara Federasi Rusia, negara – negara yang memisahkan diri dengan Uni Soviet pun tetap menganggap Rusia gagal karena pada akhirnya isu separatisme di Chechnya pun tidak dapat ditangani dengan baik.

Pada awal era pemerintahan Boris Yeltsin, ia melanjutkan agenda demokratisasi kepada Rusia. Pada masa transisinya, Yeltsin membuat transisi ganda³ yang jalan secara bersamaan, yaitu membuat perubahan reformasi politik dan reformasi ekonomi, dan selanjutnya Yeltsin mengambil dan mengaplikasikan nilai – nilai demokrasi liberal⁴.

Dalam reformasi politik, terpilihnya ia sebagai presiden melalui RSFSR menjadi batu loncatan baginya untuk merancang konstitusi baru, rancangan konstitusi baru tersebut dinamai “Konstitusi Yeltsin”⁵. Konstitusi Yeltsin tersebut

¹ Sunaryono, Bambang. (2012). *Rusia Pascakomunisme: Jalan Panjang Menuju Perubahan*. Prudent Media bekerjasama dengan Jurusan Hubungan Internasional UMY: Yogyakarta

² Ibid.

³ Pramestiwi, Phita, dkk. (2014). *Pengaruh Demokratisasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Rusia Pada Masa Pemerintahan Boris Yeltsin*. Jurnal Hubungan Internasional Universitas Jember: Jember.

⁴ Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Rusia oleh Drs. Bambang Sunaryono M.Si, 3 Februari 2016.

⁵ Sunaryono. Ibid hal – 135.

berisi tentang perlunya lembaga kepresidenan yang sangat kuat atau yang seterusnya dapat disebut sistem *superpresidensialisme*⁶.

Definisi superpresidensialisme sendiri adalah mengutamakan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, badan legislatif yang sangat lemah (Presiden berkuasa untuk membuat undang – undang lewat dekrit, menentukan posisi pemerintahan, dan melindungi eksekutif dari pengawasan parlemen), kemudian yudikatif yang kurang berkembang bahkan bisa jadi tidak jalan sama sekali; pemilihan umum secara terbuka dan reguler; kebebasan warga negara (*civic freedom*); hak – hak untuk mengkritik Presiden; hak untuk mengorganisasikan kekuatan oposisi; Presiden tidak hanya memiliki kekuasaan secara legitimate berdasarkan konstitusi, namun Presiden juga dapat berkuasa atas aneka macam aparat birokrasi pemerintahan dimana model ini tidak dikenal dalam demokrasi model Barat; dan *Zero-sum*⁷ (*the winner takes all – Yeltsin and President's men: Boris Berezovsky; Khodorkovsky; Potanin; Alekperov; Rem Vyakhirev*⁸).

Untuk menjalankan reformasi ekonomi, Yeltsin menganggap bahwa perlu adanya perubahan pada konstitusi untuk dapat menjalankan pemerinthannya, pasalnya sistem pemerintahan yang ada saat itu masih menggunakan sistem tradisional Uni Soviet yang menganut sistem pasar yang terencana dan terpusat yang dipegang sepenuhnya oleh pemerintah. Ternyata sistem tersebut sangat

⁶ Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Rusia oleh Drs. Bambang Sunaryono M.Si, 9 Februari 2016.

⁷ Ishiyama, John, dkk. *Superpresidentialism and Political Party Development in Russia, Ukraine, Armenia, and Kyrgyzstan*. Journal Europe – Asia studies Vol. 53 – No 8. 2001. 1177 – 1191.

⁸ Fahrurrodji, A. (2005). *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. Hal – 200.

membatasi ruang gerak Boris Yeltsin sebagai Presiden untuk melakukan reformasi ekonominya yang memang membutuhkan banyak dukungan rakyat.

Pada saat era Yeltsin dimulai, ia ingin mencapai sistem pasar bebas secara singkat, Yeltsin menggunakan agenda terapi kejut atau yang dapat disebut *Shock Therapy*⁹ yang sangat mem-Barat-kan ekonomi Rusia dan hal tersebut diadopsi dari negara – negara kapitalis modern yang berada dalam wadah internasional¹⁰, seperti *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia (*World Bank*), dan ekonom Amerika Serikat yang cenderung terlibat aktif dalam reformasi ekonomi besar – besaran Rusia. *Shock Therapy* tersebut merupakan proses swastanisasi perusahaan – perusahaan yang selama ini dikuasai oleh pemerintah dan direbutkan oleh pengusaha – pengusaha kalangan masyarakat yang memunculkan kelompok – kelompok OKB (Orang Kaya Baru)¹¹. Mereka membuat sebuah *inner circle* dan menamai diri mereka sebagai kaum origarki yang mendukung, sekaligus memanfaatkan kekuasaan rezim Boris Yeltsin.

Berkat kerja keras Yeltsin dalam merombak konstitusi Rusia, reformasi ekonomi Rusia akhirnya berubah menjadi ekonomi berbasis pasar bebas dimana sistem pasar dikembalikan oleh masyarakat dan masyarakat bebas mengatur pasar tersebut.

Peran Boris Yeltsin dalam reformasi hebat Rusia pada tahun 1991 – 1998 tersebut sangat membawa pengaruh besar pada perombakan besar – besaran pada bidang politik, demokrasi dan ekonomi di Rusia. Yeltsin adalah kaum reformis

⁹ Sunaryono Ibid hal-136.

¹⁰ Sunaryono Ibid hal-137.

¹¹ Fahrurodji. Ibid hal 202

yang berani merombak Rusia besar – besaran dengan melawan parlemen – parlemen yang tidak sejalan dengan pemikirannya (badan legislatif yang dikuasai kubu garis keras komunis), sehingga Rusia dapat mencapai kemakmurannya pada era pemerintah Boris Yeltsin.

Politik luar negeri era Boris Yeltsin merupakan sebuah perubahan revolusioner yang sangat besar, mengingat era Yeltsin adalah era reformasi transisi dari komunisme ke arah demokrasi. Politik luar negerinya cukup memegang teguh tiga pilar penting¹², yaitu: hubungan dengan negara – negara dekat (*near abroad*) atau negara – negara pecahan Uni Soviet; negara – negara di kawasan Eropa dan Amerika; dan Asia.

Hubungan dengan negara – negara Eropa dan Amerika dianut dari pemikiran *The Westernisers (Zapadniki)* yaitu kepercayaan bahwa Rusia perlu membuka hubungan dengan Barat. Dalam tradisi pro – Barat (*Zapadniki*) abad 19 dan era presiden sebelum Yeltsin, yaitu Gorbachev, aliran pro – Barat ini dipercaya bahwa membuka hubungan dengan Barat akan membantu mengamankan demokratisasi dan pasar bebas terhadap kelembaman (*inertia*) dan oposisi.¹³

Presiden Boris Yeltsin bersama Menteri Luar Negeri saat itu, adalah Andrei Kozyrev dan wakil Menteri Luar Negerinya adalah Igor Gaidar sangat gencar melakukan orientasi pro-Barat ini, untuk itu pendekatan politik luar negeri ini dianggap sangat mengutamakan Barat (*West First*) atau *Atlanticism*¹⁴, tujuannya

¹² Fahrurodji. Ibid hal – 232.

¹³ Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Russia oleh Drs. Bambang Sunaryono M.Si, 9 Maret 2016.

¹⁴ yaitu paham yang percaya bahwa Eropa dan Amerika dan Kanada harus bekerja sama dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi untuk melindungi negara – negara anggota dan melindungi nilai – nilai yang menyatukan mereka.

adalah untuk menaikkan lagi ekonomi Rusia melalui reformasi ekonomi baru tersebut karena sejak mundurnya Gorbachev sebagai Presiden Rusia pada penghujung tahun 1990¹⁵, Rusia mengalami kemunduran pada segala bidang, termasuk politik, ekonomi, dan militer.

Filosofis pendekatan barat¹⁶ sendiri adalah 1) pengaplikasian nilai – nilai Barat (demokrasi hak – hak asasi manusia, penegakkan *rule of law*¹⁷ sebagai sikap mental baru Rusia); 2) keamanan Rusia harus dijalankan secara aktif yaitu dengan peran sertanya dalam organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE). Namun nilai – nilai pendekatan pro – Barat yang digandang – gandingkan oleh Yeltsin dan juga Menteri Luar Negerinya itu membawa kritik tajam dari kalangan – kalangan pengamat politik di Rusia. Pasalnya, politik luar negeri pro – Barat itu dianggap menjatuhkan martabat dan harga diri Rusia, karena pengamat politik Rusia menganggap Kozyrev melupakan kepentingan – kepentingan nasional dan keamanan Rusia dengan mendengarkan dan menuruti keinginan dan perintah yang diberikan oleh Barat¹⁸, serta melupakan dan tidak mendukung negara – negara Baltik¹⁹ ketika terjadi ‘*ethnic cleansing*’ di sana dan juga negara – negara *near abroad*.

¹⁵ Andrei Shleifer & Daniel Treisman, *Without a Map, Political Tactics and Economic Reform in Russia*, Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2001. Hal. 1 (Melalui skripsi Muhammad Ali Busthomi, Universitas Indonesia: lib.ui.ac.id)

¹⁶ Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Russia oleh Drs. Bambang Sunaryono M.Si, 9 Maret 2016.

¹⁷ Supremasi hukum yang dibangun berdasarkan keadilan. Rule by the law, bukan rule by the man.

¹⁸ Alexei K. Pushkov. *Letter from Eurasia: Russia and America: The Honeymoon's Over*. Foreign Policy No. 93 (Winter 1993-1994), h.78-79 (melalui skripsi Syarifuddin Harfansyah: repository.umy.ac.id)

¹⁹ Negara – negara Baltik adalah negara – negara pecahan Uni Soviet yang berada di sekeliling laut Baltik yang berada di Eropa Utara, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania.

Selain Menteri Luar Negeri Kozyrev, Yeltsin sebagai Presiden juga dikritik tajam oleh pengamat – pengamat politik tersebut. Yeltsin telah dianggap sebagai Presiden yang keputusannya tidak dapat diprediksi dan berakhir tidak jelas, karena faktanya Rusia telah memberikan banyak kelonggaran untuk Barat, namun timbal balik negara – negara Barat tidak sepenuhnya memuaskan dan akhirnya mengantarkan Rusia kembali kepada citra buruk dan juga memalukan di dunia internasional.

Setelah mendapat kegagalan dalam sistem pro-Baratnya, Rusia mengeluarkan kebijakan luar negerinya pada tahun 1993²⁰ yang mengatakan bahwa Rusia memiliki kepentingan yang tidak akan pernah sejalan dengan Barat, dan mementingkan peran Rusia sebagai penanggung perdamaian dan juga keseimbangan negara – negara *near board*. Setelah keluarnya kebijakan luar negeri tersebut, akhirnya arah kebijakan luar negeri era Yeltsin lebih condong ke pendekatan Eurasianists, yaitu pendekatan yang beranggapan bahwa Rusia digambarkan sebagai dua kepala garuda yang wajib berpandangan ke arah Barat dan juga Timur. Hal ini muncul karena Rusia beranggapan bahwa Rusia adalah negara yang merupakan bagian dari Eropa dan juga Timur sebagai penengah dari keduanya, dan pendekatan ini dipelopori oleh Sergei Stankevich (1992 – 1993).²¹ Pendekatan Eurasianist ini awalnya ingin sekali Rusia juga memusatkan perhatiannya pada negara – negara *Commonwealth of Independent State (CIS)*²²,

²⁰ Richard Sakwa. (2008). *Russian Politics and Society (4th ed.)*. Routledge: London. h.365.

²¹ Catherine Danks. (2013). *Politics Russia*. Routledge: New York. hal-351

²² Negara – negara persemakmuran bekas Uni Soviet yaitu Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgiztan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Near Abroad (Negara – negara bekas Uni Soviet), Timur Tengah, Afrika, dan khususnya Asia. Karena Eurasianist mengecam tindakan Yeltsin yang hanya menitik beratkan ketergantungannya pada Barat dan ingin mensejajarkan diri terutama dengan bekas musuh Uni Soviet, yaitu Amerika Serikat.

Kegagalan sistem pro – Barat dan juga munculnya politik luar negeri dengan pendekatan Eurasianists ini merupakan tanda juga bagi runtuhnya karir Menteri Luar Negeri Kozyrev, pasalnya selain saat dikritik tajam saat menggunakan sistem pro-Barat, saat pengaplikasian politik luar negeri menggunakan Euranists, Kozyrev juga dianggap gagal oleh pengamat politik karena perubahan arah kebijakan politik luar negeri ini lebih bersifat mengambil keuntungan sendiri (oportunis) dalam politik dan juga kritik keras dari dunia internasional saat memiliki masalah dengan Amerika Serikat. Akhirnya pada tahun 1996, Kozyrev mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri dan digantikan oleh Yevgeny Primakov.

Dibawah menteri luar negeri baru Yevgeny Primakov, ia menggunakan pendekatan *Great Power (derzhavniki)* dan *Strong State (gosudarstvenniki)*²³ untuk menyusun tulang punggung Rusia sebelum mengeluarkan kebijakan luar negeri. Pendekatan ini, sesuai namanya, Rusia harus menjadi negara yang besar dengan mengerahkan segala kekuatan untuk dapat memelihara integritas atau konsistensi wilayahnya untuk mencegah anarki (pemberontakan) dan kekacauan (*chaos*). Pemikiran pendekatan ini adalah gabungan dari Eurasianist dan Nasionalisme Rusia. Pendekatan ini juga didukung oleh Sergei Karaganov, ia

²³ Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Rusia Drs. Bambang Sunaryono M.Si. 18 Maret 2016.

adalah ilmuwan politik Rusia yang mengetuai Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan serta seorang dekan hubungan internasional di Sekolah Tinggi Ekonomi Moskow, juga menjadi teman dekat Yevgeny Primakov dan penasihat Presiden Boris Yeltsin dan Vladimir Putin.

Dengan berpindahnya kebijakan ekonomi Rusia berpindah dari *Shock Therapy* yang dianut dari Barat ke arah kebijakan ekonomi sentris (*centrist economic policy*), maka politik luar negerinya juga berubah dari mengutamakan Barat ke arah *the state realist centrism*²⁴. Menurut pendekatan ini, Rusia tidak perlu menolak liberalisme ala Barat secara keras, namun menghadapi secara tenang, dan membutuhkan Barat dalam batas tertentu untuk demokratisasi dan kebutuhan pasar bebas yang hanya mementingkan kepentingan Rusia. Di bawah menteri luar negeri Primakov dan wakilnya Ivanov, Rusia lebih menekankan pada keamanan kawasan utamanya yaitu negara – negara *Commonwealth of Independent State* (CIS) dan negara – negara bekas Uni Soviet (*near abroad*). *The state – realist – centrists* juga mendukung perlunya Rusia sebagai negara yang punya kekuatan besar untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri. Selain itu, menurut pendekatan ini, relasi Rusia dengan organisasi internasional juga penting untuk memenuhi kepentingan dan tujuan nasional Rusia.

²⁴ Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Rusia Drs. Bambang Sunaryono M.Si. 27 April 2016.

B. Pemerintahan Vladimir Putin (2000 – 2008)

Foto 2.2: Vladimir Putin (source: google images)



Vladimir Vladimirovich Putin atau yang dikenal sebagai Presiden Rusia saat ini sebagai Putin, lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 dan lulus dari Universitas Leningrad pada tahun 1975 dan kemudian melanjutkan pendidikannya meraih gelar PhD dalam bidang ekonomi. Setelah lulus, Putin bergabung dengan *Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB)*²⁵ dari tahun 1985 sampai tahun 1990. Putin memulai karir di pemerintahan saat menjadi penasehat Ketua Dewan Kota Leningrad, dan terus naik sebagai Deputy I Walikota Leningrad. Karir Putin dalam pemerintahan semakin melejit, ia pernah menjabat sebagai Deputy Kepala Direktorat Administrasi Kepresidenan kemudian menjadi Deputy Kepala Eksekutif Kepresidenan dan Kepala Direktorat Pusat Pengawasan dan Inspeksi, kemudian pada tahun 1998, ia naik sebagai Direktur Dinas Kemanan Federal Rusia (FSB).²⁶

²⁵ KGB adalah Badan Intelejen Uni Soviet dari 13 Maret 1954 – 6 November 1991.

²⁶ Farhurodji, Ibid hal 203.

Vladimir Putin naik sebagai Presiden baru Federasi Rusia (tepatnya sebagai *acting president*) setelah Boris Yeltsin memintanya untuk menggantikan dirinya, karena alasan kesehatan Boris Yeltsin yang menurun pada tahun 1999. Naiknya Putin sebagai *acting president*, awalnya diprediksi tidak akan dapat membawa Rusia ke arah yang lebih baik daripada era Yeltsin. Pasalnya, Vladimir Putin dipilih secara istimewa oleh Yeltsin karena Putin dipercaya oleh Yeltsin dapat menggantikan dirinya dan sebelumnya Putin sudah berada di lingkaran orang – orang dalam pemerinthan Yeltsin yang selanjutnya sudah dianggap sebagai keluarga. Putin menjadi Presiden Rusia termuda saat itu, karena sebelumnya, pemimpin – pemimpin Rusia dikuasai oleh mereka yang umurnya lebih tua.

Sebagai langkah awalnya sebagai *acting president*, Putin telah berhasil membawa kembali Chechnya ke dalam kedaulatan Rusia. Tampaknya, Putin lebih senang untuk melebarkan kekuasaan Moskow daripada melanjutkan agenda demokratisasi pendahulunya, Yeltsin. Karena keberhasilannya membawa kembali Chechnya ke area kekuasaan Moskow, maka kepercayaan warga Rusia membawa Putin terpilih lagi pada Maret tahun 2000 dari hasil pemilu dengan suara 52,77% mengalahkan 11 kandidat lainnya dan akhirnya resmi menjadi Presiden kedua Federasi Rusia untuk periode tahun 2000 sampai 2004.

Saat sudah resmi menjadi Presiden Federasi Rusia kedua, Putin melanjutkan kebijakan Boris Yeltsin, namun ia lebih mengutamakan keadaan politik Rusia dahulu (*Russia First*)²⁷ baru menata keadaan ekonominya. Putin menganggap,

²⁷ Sunaryono, Bambang. *Rusia Pascakomunisme: Demokrasi Versus Superpresidensialisme*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. XI, No 13, Agustus 2002 (129 – 138) - hal 137.

kepentingan nasional Rusia dapat secara mudah diketahui dan hal tersebut harus selalu didahulukan daripada kepentingan yang lainnya. Pada akhirnya, semua kebijakan yang dikeluarkan harus berhubungan dengan peningkatan dan penguatan negara Rusia. Hal tersebut disampaikan secara eksplisit dalam pernyataan penegasan sebagai berikut:

“... human rights issues, civil society, and democratic freedoms are of secondary importance of the Russian State. I am adamant that only a strong state is able to defend civil, political and economic freedoms.”²⁸

Putin dihadapkan oleh keadaan ekonomi dan politik Rusia yang berantakan karena peninggalan pemimpin terdahulu yang kurang menguntungkan rakyat. Untuk itulah Putin memusatkan untuk memperbaiki keadaan reformasi ekonominya dengan baik. Perbaikan ini dipusatkan dalam unsur pengembangan lingkungan hukum dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam sistem kapitalisme agar sistem tersebut dapat berjalan secara efektif²⁹. Pengalihan kekayaan negara ke pihak swasta (privatisasi) telah menjadi perantara bagi kaum oligarki untuk bertindak kriminal seperti yang diutarakan oleh Lee S. Wolosky. Pelepasan kekayaan negara dianggap telah berjalan secara tidak seperti yang seharusnya dan sangat tidak menguntungkan negara, maka dari itu Putin memusatkan penyelesaian

²⁸ Philip Zelikow. *Beyond Boris Yeltsin*. Foreign Affairs. 1994. Hal 44 – 45. Melalui Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. XI, No 13, Agustus 2002 (129 – 138) - hal 137.

²⁹ Sunaryono, Ibid hal 165.

masalah pada bidang ini, agar campur tangan negara dapat masuk kembali dan menstabilkan perekonomian negara.

Putin dikenal sebagai orang yang sangat nasionalis dan setia pada negaranya, maka dari itu ia menegaskan bahwa negara harus tetap menjaga eksistensi perusahaan – perusahaan dalam negeri dan menjaganya dari kaum – kaum oligarki yang ingin menguntungkan diri sendiri, dan istilah oligarki harus dihapus sebagai tingkatan kaum – kaum di Rusia. Putin juga menganggap bahwa kekayaan negara adalah milik rakyat dan juga negara, dan beragam eksploitasi alam negara harus menguntungkan negara dan mensejahterakan rakyat Rusia.

Hal tersebut dijabarkan dalam pidato kenegaraan pada tanggal 8 Juli tahun 2000, Putin menegaskan enam prinsip prioritas untuk mengatasi krisis ekonomi Rusia era Presiden sebelumnya. Enam prinsip prioritas tersebut adalah³⁰:

1. *guaranteeing property right;*
2. *stopping the preferential treatment of some business over others and ending unnecessary state intervention in business;*
3. *lowering the tax burden;*
4. *simplifying the customs system;*
5. *developing banks and other economic infrastructure;*
6. *reorganizing the welfare system by reducing the number of benefits.*

³⁰ Gentleman, Amelia. *Putin Turns the Heat of Yeltsin*. The Observer. 9 July 2000. Hal – 24. Melalui Sunaryono, Ibid hal 166.

Selain itu, Putin juga bersikap tegas dan ketat terhadap media massa, terutama pada media massa yang mengecam kebijakan yang ia keluarkan. Putin membungkam media karena pada masa presiden sebelumnya yaitu Yeltsin, membuka kebebasan media massa dan pendapat umum bahkan dimasukkan kedalam pilar keempat dari kekuasaan negara. Contoh media massa yang dibungkam Putin adalah keterbatasan pemberitaan tentang perang Chechnya, sehingga masyarakat Rusia tidak mengerti informasi tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara perang Rusia di sana.

Putin adalah orang yang tidak senang membuat pencitraan di publik dan media, namun ia adalah orang yang senang membuat citra baik dan reputasi dalam pemerintahannya sendiri dan orang – orang pemerintahan dalam pemerintahan sebelumnya pada era kekuasaan Gorbachev dan Yeltsin. Contohnya, Putin bersedia untuk menandatangani sebuah undang – undang yang sempat Yeltsin buat menjelang pengunduran dirinya sebagai Presiden pada tanggal 12 Februari 2001. Undang – undang tersebut memungkinkan mantan Presiden dan keluarganya terbebas dari tuntutan akibat kerugian yang ditimbulkan selama Presiden yang bersangkutan berkuasa, jaminan tersebut ditulis sebagai “*Jaminan Kepada Presiden Federasi Rusia yang Telah Mengakhiri Masa Tugasnya beserta Anggota Keluarganya*” dan siap untuk ditandatangani Presiden. Putin menyetujui undang – undang tersebut yang menjadi senjata untuk Putin agar tidak adanya kritikan yang menjatuhkannya sebagai Presiden dari pemerintahan – pemerintahan era sebelumnya.

Prioritas utama politik luar negeri Rusia era Putin dititik beratkan pada peningkatan kepentingan Rusia sebagai negara besar dan salah satu negara yang berpengaruh di dunia modern, yakni dengan menjamin dan memperkuat keamanan, integritas, dan kedaulatan wilayah negaranya serta posisinya yang sah dan kuat dalam masyarakat dunia agar potensi politik, ekonomi, spiritual, dan intelektualnya dapat meningkat.

Dalam perdebatan politik luar negeri Rusia, Putin berusaha menjadi pemimpin yang dapat menganalisa kebutuhan Rusia dan juga menyambung kerjasama dengan dunia luar, terutama Barat yang notabene adalah bekas musuh Rusia. Perlahan – lahan Rusia di bawah Putin dapat berhubungan dengan Barat tanpa masalah (dengan menyenangkan Barat) dan di sisi lain Rusia telah mendapatkan jati diri negaranya dan visi misi politik luar negerinya. Banyak sekali kaum – kaum nasionalis Rusia yang merekomendasikan visi misi politik luar negeri Rusia³¹, namun tujuan Putin hanya satu, yaitu mengembalikan kejayaan Rusia di mata dunia internasional.

Unsur nasionalisme Putin dalam pemerintahan tidak membuatnya menutup hubungan dengan dunia internasional. Selama hubungan dengan dunia internasional dapat mencapai tujuan nasional negaranya, Putin tidak keberatan untuk tetap menjalin hubungan dengan batas – batas tertentu. Dengan batas – batas tersebut, Rusia masih berhubungan dengan Barat, *G-7*, *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia (*World Bank*) dan lain – lain. Hubungan tersebut hanya membicarakan tentang hutang – hutang Rusia, pinjaman – pinjaman, dan

³¹ Sebagian dari mereka adalah para menteri – menteri pemerintahan.

kepentingan lainnya yang hanya untuk melancarkan kepentingan Rusia. Putin tetap menjalin hubungan dengan kaum – kaum reformis diluar Rusia selama mereka masih bisa diajak kerjasama, walaupun kaum – kaum tersebut ikut membuat keadaan Rusia menjadi terpuruk.

Rusia juga adalah sebuah negara yang membentang ke Barat dan Timur, dan kerja keras Putin sebagai Presiden yang nasionalis Putin berusaha agar negara – negara CIS (*Commonwealth of Independent States*) dapat menjadi tembok atau tameng Rusia di sebelah barat dan menggunakan kerjasama Organisasi Kerjasama Shanghai (*Shanghai Cooperation Organization*) untuk menjadi tembok di sebelah Timur. Selain itu Putin juga mengeluarkan politik luar negeri untuk memerangi terorisme (*war on terrorism*) dalam setiap kesempatan pidato internasionalnya dengan menggunakan Bahasa yang pantas untuk tidak menyinggung negara – negara Islam, setelah terjadinya peristiwa 911 pada tanggal 11 September 2001.

Kemampuan Putin melunakkan negara – negara pinggiran Rusia dan keberhasilannya meyakinkan para nasionalis Rusia bahwa Rusia dapat bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi negara yang kuat dan besar, membuat Putin menjadi pemimpin yang berhasil membangun citra yang sangat istimewa sekaligus ditakuti oleh masyarakat Rusia dalam negeri dan juga dunia internasional. Putin meyakini bahwa adanya hubungan ekonomi menggunakan liberalisasi ekonomi dengan dunia internasional dapat membuat kedamaian hubungan antar negara yang satu dengan yang lainnya, yang berarti pula dapat menyumbangkan perdamaian dunia.³²

³² “Vladimir Putin: Person of The Year”. *TIME*. December 31, 2007/2008.

Setelah tahun 2008, Putin digantikan oleh Presiden Rusia baru ketiga yaitu Dmitry Medvedev (sebelumnya adalah Perdana Menteri) yang menjabat dari tahun 2008 sampai tahun 2012, dan Putin turun menjadi Perdana Menteri untuk tetap mengontrol kestabilan pemerintahan Rusia. Di bawah kepemimpinan Medvedev, politik luar negeri Rusia tidak banyak berubah, masih dengan pemikiran yang diberikan Putin dengan pemikiran yang sudah dimodifikasi dan muncul sebagai doktrin Medvedev³³, sebagai berikut: 1) Rusia mengakui supremasi prinsip – prinsip dasar hukum internasional; 2) dunia harus ‘multipolar’ karena kalau dunia hanya dikuasai satu kekuatan (kutub) maka dunia akan tidak stabil dan terancam konflik; 3) Rusia tidak ingin konfrontasi dengan negara manapun; 4) Rusia wajib melindungi kehidupan dan kemuliaan warga negaranya di mana saja mereka berada (tinggal); 5) Rusia – seperti negara lainnya – mempunyai wilayah yang akan memelihara kepentingan dan hak istimewa Rusia. Prioritas utama politik luar negeri Rusia dibawah Medvedev juga dapat dijabarkan dalam tiga poin³⁴: 1) terciptanya kondisi eksternal yang kondusif bagi modernisasi Rusia: transformasi ekonomi Rusia melalui inovasi, peningkatan standar hidup, dan konsolidasi masyarakatnya; 2) memperkuat fondasi sistem konstitusi Rusia: penegakkan ‘*rule of law*’ dan institusi demokrasi; 3) pelaksanaan kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) di Rusia dan – sebagai konsekuensinya – harus menjamin kompetisi nasional dalam kancah global (dunia).

³³ Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Rusia. Drs. Bambang Sunaryono M.Si. 24 Mei 2016.

³⁴ Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Rusia Drs. Bambang Sunaryono M.Si. 24 Mei 2016.

Kepemimpinan Medvedev selesai pada tahun 2012 dan setelahnya ia kembali menduduki kursi Perdana Menteri dan Putin kembali terpilih menjadi Presiden Rusia dari tahun 2012 sampai sekarang (terhitung 2017).

C. Kecenderungan Politik Luar Negeri Rusia Di Kawasan Sekitar Rusia – Eurasia (Era Vladimir Putin)

Perlu diketahui bahwa Eurasia adalah negara – negara superbenua yang berada di kawasan gabungan Eropa dan Asia. Namun Eurasia lebih dikenal sebagai sebutan untuk negara – negara bekas Uni Soviet yang baru merdeka di kawasan Asia Tengah dan Kaukasus.

Foto: Peta politik Eurasia (sumber: European Environment Agency, eea.europea.eu)



Dalam peta dunia, tidak ada batasan geologis yang resmi apabila Eropa dan Asia digabungkan menjadi Eurasia, karena bagian timur Rusia terletak di Lempeng Amerika Utara, India terletak di Plate India dan Semenanjung Arab terletak di Lempeng Arab (Rosenberg, 2015)³⁵.

Terbentuknya dan berkembangnya wilayah Eurasia dipengaruhi oleh tiga kekaisaran luar yang pernah menempati wilayah ini (Wicaksana, 2015), yang pertama yaitu kekaisaran Roma yang telah membawa dan menyebarkan politik, agama Kristen dan budaya – budaya Eropa; kemudian kekaisaran kedua yaitu kekaisaran Ottoman yang menguasai daerah Eurasia lainnya dengan membawa agama Islam dan menyebabkan perubahan budaya yang signifikan dan menyebabkan pergesekan budaya di daerah Eurasia. Kekaisaran yang terakhir adalah Kekaisaran Timur atau *Eastern Empire* atau *The Manchurian Empire*, kekaisaran yang ketiga ini membawa budaya yang menandakan bangsa yang belum beradab (sifatnya kasar dan kejam). Akhirnya ketiga kekaisaran tersebut membentuk sebuah peradaban yang berorientasikan ketimuran.

Terhitung tahun 2012, negara – negara yang termasuk dalam Eurasia adalah 48 negara merdeka di Eropa (termasuk Cyprus, Islandia, Irlandia, dan Inggris), 17 negara di kawasan Timur – Tengah, 27 negara di Asia (termasuk Indonesia, Malaysia, Jepang, Filipina, dan Taiwan), negara baru yang dihubungkan dengan Oceania, Timor Timur, dan jumlah tersebut telah berjumlah hampir setengah total negara mereka di dunia (Rosenberg, 2015).

³⁵ Rosenberg, Matt, 2015. "What Is Eurasia?", dalam *About Education*. [online]. Tersedia di: <http://www.geography.about.com/od/learnabouttheearth/a/What-Is-Eurasia.htm> [Diakses 24-3-17].

Putin memulai kebijakan luar negerinya pada Eurasia saat Rusia menyerukan dan campur tangan langsung dalam pembentukan Uni Eurasia dan mengatakan bahwa terlibatnya Rusia dalam Uni Eurasia adalah kebijakan luar negeri prioritas Putin³⁶. Putin menulis alasannya pada sebuah kabar harian *Izvestia* untuk menggagas Uni Eurasia, ia ingin menggelar kerjasama dengan negara – negara bekas pecahan Uni Soviet agar lebih erat dengan menggagas ide yang sama pada saat Rusia menggelar hubungan integritas ekonomi dengan Belarus dan Kazakhstan, yaitu³⁷: “*Proyek Integrasi Eurasia Baru: Masa Depan yang Dimulai Hari Ini.*”. Untuk itu Putin ingin memperluas kerjasama dengan negara – negara pecahan Uni Soviet dengan mengatakan sebagai berikut:

*“Kami menetapkan tujuan yang lebih ambisius untuk maju ke tingkat selanjutnya, ke integrasi yang lebih tinggi, yaitu Uni Eurasia,” yang akan “dibangun berdasarkan pengalaman Uni Eropa dan koalisi regional lainnya.”*³⁸

Putin juga menyerukan bahwa dengan membentuk Uni Eurasia, Rusia dapat terbantu untuk masuk ke organisasi internasional WTO (*World Trade Organization*)³⁹, karena Rusia adalah negara dengan salah satu perekonomian terbesar dan masih berada di luar organisasi internasional tersebut, disebabkan oleh masalah permanen pada saat pemerintahan sebelumnya, yaitu Demitry Medvedev.

Kebijakan Putin kepada Eurasia mulai digagas kembali sejak diujung masa jabatannya sebagai perdana menteri dan akan maju di pemilihan umum pada tahun

³⁶ Nn. *Putin Serukan Pembentukan “Uni Eurasia”*. 4 Oktober 2011. Diakses melalui kompas.com/internasional 25-03-17 pk. 12:11

³⁷ Ibid kompas.com/internasional

³⁸ Ibid kompas.com/internasional

³⁹ Ibid kompas.com/internasional

2012. Putin menggagas untuk menggelar transaksi pasar Rusia di daerah Eurasia, hal itu dinilai sebagai pijakan baru Putin sebagai kebijakan politik luar negerinya yang baru untuk menghidupkan kembali kebijakan Timur Rusia. Awalnya kebijakan ini sudah akan diterapkan oleh Putin pada masa pemerintahannya pada tahun 2000 sampai 2008, namun kebijakan ini menjadi hilang karena masa jabatan Putin menjadi presiden akan habis.

Kebijakan luar negeri aliansi Eurasia yang dijalankan oleh Putin menggandeng 4 negara bekas Uni Soviet (Belarus, Kazakhtan, Kyrgystan, dan Armenia) dengan menggelar aliansi ekonomi agar mendorong integrasi negara mereka. Aliansi ini meliputi perdagangan bebas, mengoordinasikan sistem keuangan anggotanya, mengatur bersama industri dan kebijakan pertanian, dan mengembangkan pada bidang transportasi dan juga pada bidang pasar ketenagakerjaan.⁴⁰ Prinsip aliansi dengan Eurasia ini menggunakan prinsip yang saling menguntungkan dan memperhatikan tujuan negara bersama, seperti yang dikatakan Putin:

“Integrasi Eurasia ini berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan memperhatikan kepentingan bersama.”⁴¹

Tampaknya Putin ingin membuat suatu kekuatan terbaru seperti Uni Soviet namun dalam bentuk baru. Orientasi pandangan Putin dengan Uni Eurasia ingin dibuat seperti Uni Eropa yang dapat membentuk suatu integrasi yang saling

⁴⁰ Nn. *Rusia dan 4 Negara Bekas Uni Soviet Bangun Aliansi Rusia, Aktif per 1 Januari*. 24 Desember 2014. Diakses melalui kompas.com/internasional tanggal 25-03-17 pukul 11:47.

⁴¹ *Ibid* kompas.com/internasional.

menguntungkan, dan tujuan masing – masing anggota negara tetap tercapai melalui kerjasama tersebut.